

BAB IV

RUNTUHNYA PNI: ANALISIS DALAM PERSPEKTIF TEORI MASYARAKAT TERBUKA DAN TERTUTUP KARL R. POPPER

Pada bab ini, penulis akan menganalisis keruntuhan Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam kerangka teori masyarakat terbuka dan masyarakat tertutup menurut Karl Popper. Berbeda dengan penulisan bab-bab sebelumnya yang bersifat deskriptif-historis dan teoritis, bab ini lebih menekankan analisis interperspektif terhadap realitas politik Indonesia dari sudut pandang teori Karl Popper, terutama dalam hubungannya dengan kemunduran dan hilangnya eksistensi PNI dari sistem politik nasional. Melalui analisis ini, penulis berupaya menunjukkan bahwa keruntuhan PNI bukan sekadar akibat dari peristiwa politik biasa, melainkan sebagai fenomena struktural yang berkaitan erat dengan perubahan sistem politik Indonesia dari kondisi yang relatif terbuka menuju kondisi yang tertutup dan otoriter.

Perlu dicatat bahwa analisis ini hanya tertuju pada PNI yang dibentuk kembali pada tahun 1946, pasca-kemerdekaan. Hal ini disebabkan karena Indonesia pada masa tersebut telah merdeka dan memiliki pemimpin negara yang dipilih melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam sidang itu, Ir. Soekarno terpilih sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden, karena dianggap layak untuk memimpin bangsa yang baru merdeka.¹ Sementara itu, PNI awal yang didirikan pada tahun 1927 tidak menjadi bagian dari analisis ini, karena pada masa tersebut pemerintahan nasional Indonesia belum terbentuk. Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa kolonial ini, tidak ada pemerintahan nasional dan jabatan Presiden Republik Indonesia. Pemerintahan dijalankan oleh Belanda dan Jepang sebagai kekuatan pendudukan.

¹ Hayatun Na'imah, "Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintas Sejarah Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Khazanah*, Vol. 13, No. 1 (Banjarmasin: Juni 2015), hlm. 120.

4.1 Partai Nasional Indonesia sebagai Aktor Politik dalam Konteks Masyarakat Terbuka

Dalam kerangka teori masyarakat terbuka yang dikemukakan oleh Karl Popper, masyarakat terbuka diartikan sebagai tatanan sosial-politik yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap kebebasan individu, rasionalitas kritis, pluralisme, serta keterbukaan terhadap kritik dan perubahan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan elemen esensial yang harus ada dalam demokrasi. Kebebasan individu menjadi salah satu prinsip utama karena secara filosofis, prinsip ini berhubungan langsung dengan martabat manusia. Selain itu, kebebasan individu memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Melalui kebebasan, individu dapat memandang dirinya sebagai subjek yang memiliki kehendak, pilihan, dan tanggung jawab atas diri sendiri. Dalam konteks ini, manusia tidak dipandang sebagai alat negara, melainkan sebagai subjek otonom yang bebas dari determinasi dan intervensi eksternal, seperti pembatasan, ancaman, pemaksaan, dan manipulasi dalam bertindak.²

Selain kebebasan individu, rasionalitas kritis juga harus dijunjung tinggi dalam masyarakat terbuka. Seperti halnya ilmu pengetahuan yang selalu terbuka terhadap kemungkinan kesalahan dan berbagai bentuk kritik,³ Popper berpendapat bahwa negara pun harus bersikap demikian. Hal ini menjamin warga negara untuk bersikap kritis terhadap semua kebijakan politik yang diambil, guna menghindari praktik otoritarianisme. Dengan demikian, rasionalitas kritis menuntut adanya sikap terbuka untuk menerima masukan, baik dalam bentuk kritik maupun solusi demi perubahan dan kemajuan suatu tatanan. Pluralisme juga menjadi prinsip yang tak boleh diabaikan, karena dalam sebuah negara, perbedaan pandangan hidup, agama, kebudayaan, dan karakter individu merupakan hal yang tidak dapat dihindari.⁴ Pluralisme berperan untuk melindungi warga negara dari pandangan yang bersifat memonopoli kebenaran.

² Ridha Aida, "Liberalisme dan Komunitarianisme: Konsep Tentang Individu dan Komunitas", *Jurnal Demokrasi*, Vol. 4, No. 2 (Padang: November, 2005), hlm. 96.

³ Sulhatul Habibah, *loc. cit.*, hlm. 307.

⁴ Fatonah Dzakie, "Meluruskan Pemahaman Pluralisme dan Pluralisme Agama di Indonesia", *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 9, No. 1 (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 79.

Dalam sistem politik semacam ini, kekuasaan politik tidak dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan final, melainkan sebagai amanah yang bersifat sementara, dapat dikritik, diuji, dan diganti melalui mekanisme demokratis yang rasional dan transparan. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan politik negara, terutama dalam upaya penetapan kebijakan.

Pasca kemerdekaan, Indonesia menganut prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas. Soekarno, yang pada saat itu menjabat sebagai kepala negara, sangat mengutamakan kepentingan rakyat. Suara rakyat didengar, kritik diterima, dan aspirasi perubahan diupayakan dengan sikap kritis terhadap setiap kebijakan yang diambil. Ia tidak menganggap kritik sebagai ancaman, melainkan sebagai cara rasional untuk mencapai kesepakatan bijaksana demi kemajuan dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terlihat dari kesediaannya untuk membentuk kembali Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1946, yang merupakan partai oposisi pemerintah. Meskipun pelopor pendirian kembali PNI adalah S. Mangoensarkoro dan beberapa tokoh nasionalis lainnya, sebagai kepala negara, Soekarno bersedia menjadi tokoh utama yang dipakai para aktivis partai ini untuk mempromosikannya kepada seluruh rakyat Indonesia.⁵

Selama periode revolusi, meskipun hubungan Soekarno dengan ketua PNI terasa dingin, hal tersebut tidak membuat Soekarno menarik diri atau mengabaikan partai ini.⁶ Dalam keadaan seperti ini, PNI mampu membangkitkan semangat anggota untuk berjuang lebih maksimal tanpa harus bergantung pada pihak lain yang bersikap apatis. Setelah partai ini mencapai target popularitasnya, Soekarno dengan sendirinya kembali memberikan dukungan kepada PNI. Berkat dukungannya, PNI berhasil mencapai kategori partai besar dengan basis pendukung yang signifikan, terutama dari wilayah Jawa.⁷

⁵ Aryani Dewantarina, "Partai Nasional Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 1955 di Semarang", *Journal of Indonesian History*, Vol. 1, No. 2 (Semarang: 2012), hlm. 74.

⁶ Jose Eliseo Rocamora, *op. cit.*, hlm. 26.

⁷ Alfi Ramadhan dan Ahmad Izzudin, *op. cit.*, hlm. 6079.

Sikap Pemerintah Indonesia pada periode revolusi yang bersifat demokratis juga tampak dalam penolakan terhadap kapitalisme, imperialisme, dan sosialisme.⁸ Pemerintah berpendapat bahwa sistem-sistem tersebut akan menciptakan praktik politik yang otoriter dan totalitarian. Dengan memanfaatkan kekayaan, kekuasaan, dan kontrol total atas masyarakat, sistem ini akan memaksa individu untuk mengorbankan haknya demi kepentingan segelintir orang. Berdasarkan pandangan ini, Pemerintah Indonesia dan partai-partai politik pada masa itu, termasuk PNI, menolak keberadaan bangsa kolonial dan praktik-praktik kolonialisme karena dianggap dapat menciptakan sistem pemerintahan yang otoriter dan totalitarian.

Meskipun tidak menjadi bagian dari poin analisis, penting untuk diketahui beberapa hal terkait PNI 1927. PNI merupakan partai nasionalis yang sejak awal berdirinya sangat memperhatikan kepentingan rakyat. Aspirasi rakyat dijadikan landasan dasar untuk melawan penjajah dan pemerintah yang bersikap kooperatif atau berpihak kepada penjajah. Pada masa awal pembentukannya (1927), PNI telah merespons banyak kejanggalan yang dibuat oleh pemerintah dan bangsa penjajah. Dalam konteks ini, PNI dapat dipandang sebagai aktor politik yang secara normatif selaras dengan prinsip masyarakat terbuka. Namun, karena kecerobohan dan ambisi bangsa kolonial untuk tetap menguasai Indonesia, pergerakan PNI kemudian dibungkam. Bangsa kolonial menganggap PNI sebagai ancaman serius bagi eksistensinya sehingga harus dibubarkan. Pada tanggal 11 November 1930, mimpi buruk PNI menjadi kenyataan ketika partai ini dibubarkan secara resmi.⁹

Melalui uraian singkat di atas, dapat dilihat bahwa PNI sejak awal kemunculannya sangat berpihak kepada rakyat. Partai ini berani berdiri sebagai pihak oposisi yang menentang kolonialisme dan pemerintah kooperatif. Salah satu contoh yang dapat diambil sebagai bukti bahwa PNI menjadi pihak oposisi adalah penolakannya yang radikal terhadap persetujuan besar antara pemerintah Republik dan Belanda, di mana PNI secara substantif menganggap perjanjian tersebut terlalu menguntungkan pihak kolonial yang melemahkan posisi kedaulatan Indonesia.¹⁰

⁸ Jose Eliseo Rocamora, *op. cit.*, hlm. 25.

⁹ Alfi Ramadhan dan Ahmad Izzudin, *loc. cit.*

¹⁰ Jose Eliseo Rocamora, *loc. cit.*

Keberpihakan partai pada rakyat kecil juga terlihat dalam program-program politiknya pasca kemerdekaan, seperti mengupayakan blok anti-kapitalis, menuntut hak asasi rakyat, melawan isu-isu politik yang dapat menghambat tumbuhnya masyarakat demokratis-sosialistis, mengupayakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang masih berada dalam wilayah kesatuan, menuntut undang-undang perburuhan yang menjamin nasib buruh, menuntut sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional, menuntut jaminan kebebasan keyakinan individu, dan masih banyak lagi.¹¹ Selain itu, dengan mengusung ideologi nasionalisme, partai ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran politik rakyat demi memperjuangkan kedaulatan nasional.¹²

PNI hadir bukan hanya sebagai organisasi politik elite, tetapi juga sebagai sarana mobilisasi politik rakyat, yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik negara, terutama dalam upaya memerangi sisa-sisa kolonialisme di Indonesia. Dengan demikian, kehadiran PNI dalam panggung politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan (di mana Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer) berperan sebagai kanal institusional bagi aspirasi rakyat, sekaligus sebagai alat kontrol terhadap pemerintahan negara. Dalam pemikiran Popper, sistem kerja PNI mencerminkan karakter masyarakat terbuka, karena memberi ruang bagi rakyat untuk berdialog, mengemukakan pendapat, bersikap kritis terhadap pemerintah, dan menjamin kebebasan individu.

4.2 Perubahan Struktur Sistem Politik Indonesia Menuju Masyarakat Tertutup

Perubahan sistem politik Indonesia pascakemerdekaan menunjukkan kecenderungan yang beralih dari masyarakat terbuka menuju masyarakat tertutup. Setelah meraih kemerdekaan, Indonesia memasuki periode revolusi (1945-1949). Pada masa ini, perhatian pemerintah terfokus pada perjuangan memberantas sisa-sisa kolonialisme, mengingat Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia.

¹¹ Indiana University Library, *Partai Nasional Indonesia: Perjuangan P.N.I dalam Parlemen* (Malang: Penerbit Pembina Rakyat, 1950), hlm. 12-13.

¹² Adilla Aura Putri, dkk., "Sejarah Organisasi Politik: Partai Nasional Indonesia Pada Masa Pergerakan Nasional", *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, Vol. 8, No. 5 (Cirebon: Mei 2024), hlm. 628.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada awal kemerdekaan, Indonesia masih dilanda praktik peperangan di beberapa daerah sebagai upaya melawan kekuatan kolonial demi mempertahankan kemerdekaan.¹³ Dalam periode ini, kehidupan sosial-politik negara belum stabil, karena pemerintah masih berkonsentrasi pada pemberantasan kolonialisme. Beberapa pemikir nasional mengamati bahwa sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa ini merupakan campuran antara sistem presidensial dan parlementer. Disebut presidensial karena kepala pemerintahan berada di tangan presiden yang tidak bertanggung jawab kepada DPR, sedangkan disebut parlementer karena presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).¹⁴ Meskipun demikian, pada 14 November 1945, Soekarno-Hatta secara tegas mengumumkan bahwa sistem pemerintahan yang berlaku selama periode ini adalah sistem presidensial. Langkah ini dimaksudkan untuk menghapus kesan bahwa pemerintahan Soekarno-Hatta merupakan boneka Jepang, sehingga diberlakukan sistem pemerintahan presidensial melalui penetapan UUD 1945.¹⁵

Periode ini dapat disebut sebagai masa transisi dari koloni menuju negara berdaulat penuh. Pemerintahan asing yang awalnya bersikap otoriter, menindas, menolak kritik, dan membatasi kebebasan individu, perlahan-lahan digantikan dengan sistem pemerintahan lokal yang lebih terbuka, menghargai kebebasan warga negara, dan bersikap demokratis. Periode pemerintahan asing dapat dikategorikan sebagai masyarakat tertutup karena membatasi peran-peran warga negara sebagaimana telah diuraikan. Tidak mengherankan, pada masa ini PNI mengalami kehancuran atau dipaksa untuk membubarkan diri karena dianggap mengancam eksistensi kekuasaan asing. Setelah meraih kemerdekaan dan memasuki periode revolusi, Indonesia sedikit lebih demokratis karena pemerintah menghargai warga negara sebagai individu yang ingin bebas dari segala bentuk penindasan. Meskipun demikian, kebebasan individu pada periode ini masih

¹³ Zahra Humaniorah Gajah, "Perjuangan Kemerdekaan Indonesia", *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 8, No. 11 (Lampung: November 2024), hlm. 55.

¹⁴ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, *Sistem Pemerintahan Negara: Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016), hlm. 16-17.

¹⁵ Himawan Indrajat, "Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi", *Jurnal Sosiologi*, Vol. 18, No. 1 (Bandar Lampung: Maret 2016), hlm. 56.

terbatas pada kebebasan dari penjajahan bangsa asing, sementara kebebasan lainnya, seperti kebebasan mengemukakan pendapat, memberikan kritik, mempertanyakan kebijakan, memperoleh pendidikan, dan lain-lain, belum dijamin sepenuhnya. Hal ini bukan disebabkan oleh keinginan pemerintah Indonesia sendiri, melainkan karena desakan dari kolonialisme Belanda yang ingin kembali menguasai bangsa Indonesia.

Setelah periode revolusi, Indonesia memasuki fase Demokrasi Liberal (parlementer), di mana UUD 1945 digantikan dengan UUDS 1950 yang berlaku hingga tahun 1959. Pada periode ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana presiden atau raja berperan sebagai kepala negara, sementara perdana menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan. Sistem parlementer sendiri merupakan sebuah sistem pemerintahan yang pertama kali diterapkan di Inggris sebagai respons terhadap sistem monarki absolut yang berkuasa dengan adagium "*The King Can Do No Wrong*" (Raja Tidak Pernah Salah).¹⁶ Terhadap sistem monarki absolut ini, pemerintah Inggris merasa perlu memberikan batasan terhadap penguasa agar tidak memiliki kuasa untuk mengklaim bahwa raja selalu benar, sebab klaim ini hanya akan melahirkan sistem pemerintahan yang otoriter. Setelah diterapkannya sistem parlementer, kehadiran presiden atau raja dalam sistem ini hanya bersifat simbolis, sementara segala kegiatan pemerintahan tetap dipimpin oleh perdana menteri. Kekuasaan untuk mengangkat atau menurunkan perdana menteri berada di tangan parlemen, yang sewaktu-waktu dapat menurunkan perdana menteri hanya berdasarkan mosi tidak percaya. Parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan karenanya bertanggung jawab penuh kepada rakyat.¹⁷

Sistem pemerintahan parlementer diterapkan di Indonesia pada periode Demokrasi Liberal (1950-1959). Disebut periode Demokrasi Liberal karena pada masa ini Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang kekuasaannya

¹⁶ Marwono, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan: Konstitusionalitas dan Implikasi Presidential Threshold Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945* (Malang: Penerbit Inteligensia Media, 2021), hlm. 51.

¹⁷ Nunuk Nuswardani, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Konsep dan Praksis Penyelenggaraannya* (Malang: Penerbit Setara Press, 2021), hlm. 5.

dimoderasi oleh konstitusi. Artinya, kekuasaan pemerintah tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi, diatur, dan diawasi oleh UUD (konstitusi). Konstitusi yang dibangun memberikan perhatian khusus pada kebebasan individu dan memberikan batasan pada para pemimpin. Ciri khas periode ini adalah mengutamakan kebebasan individu, di mana agama menjadi urusan masing-masing pribadi karena persoalan keyakinan berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, serta mengedepankan HAM yang berkaitan dengan hak atas kebebasan individu.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Demokrasi Liberal juga dapat disebut sebagai demokrasi parlementer karena kekuasaan legislatif lebih dominan dibandingkan eksekutif. Sistem ini mengedepankan kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan yang seimbang, dan perlindungan terhadap hak-hak individu melalui konstitusi. Lebih jauh, ciri utama Demokrasi Liberal adalah adanya sistem multipartai, di mana rakyat diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara melalui partai politik. Dalam konteks Indonesia, pemberlakuan sistem multipartai bermula dari Maklumat Pemerintah pada 3 November 1945, di mana rakyat diberikan ruang untuk membentuk partai politik. Setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, banyak kelompok masyarakat yang membentuk partai politik, seperti PNI, Masyumi, NU, PKI, PSI, Parkindo, dan lain-lain. Selama periode Demokrasi Liberal, partai-partai tersebut memposisikan diri sebagai wadah penampungan aspirasi rakyat yang kemudian disalurkan kepada pemerintah melalui lembaga legislatif. Legislatif bertugas untuk mengawasi dan mengontrol jalannya sistem kekuasaan agar terhindar dari praktik-praktik otoritarianisme dan totalitarianisme.¹⁹

Meskipun sistem multipartai pada periode Demokrasi Liberal menciptakan terjadinya ketidakstabilan politik akibat perbedaan kepentingan antarpartai di parlemen, namun sistem ini telah memberi landasan sejarah demokrasi Indonesia dengan melaksanakan Pemilu pertama kali pada tahun 1955. Pemilu dilaksanakan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁹ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, "Demokrasi Liberal di Indonesia: Pengertian, Sejarah, dan Dinamika Penerapannya" dalam *KPU Papua Pegunungan*, 08 Oktober 2025, <https://papuapegunungan.kpu.go.id/page/read/kontak-kami>, diakses pada 17 Februari 2026.

untuk memilih DPR dan Konstituante sebagai wakil rakyat untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara.²⁰

Jika ditinjau dari perspektif pemikiran Popper, periode Demokrasi Liberal dapat dianggap mencerminkan karakteristik masyarakat terbuka. Dalam upaya melawan tirani, Popper mengklasifikasikan pemerintahan ke dalam dua tipe. *Tipe pertama* adalah pemerintahan yang dapat dibubarkan tanpa melalui pertumpahan darah, yang dapat dilakukan melalui pemilihan umum. Di sini, institusi sosial menyediakan sarana bagi rakyat untuk membubarkan penguasa, dan institusi-institusi tersebut harus dilindungi agar tidak dengan mudah dihancurkan oleh penguasa. *Tipe kedua* adalah pemerintahan yang hanya dapat dibubarkan melalui revolusi. Menurut Popper, istilah demokrasi lebih tepat digunakan untuk tipe pertama, sedangkan tipe kedua lebih layak dilabeli sebagai tirani atau kediktatoran.²¹ Tipe pertama lebih mencerminkan situasi masyarakat demokratis di mana warga negara diberikan kebebasan untuk berpartisipasi aktif dalam politik melalui institusi sosial yang ada. Partisipasi ini dapat dilakukan dengan mempertanyakan kebijakan penguasa yang menyimpang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memiliki kekuasaan untuk menurunkan penguasa yang bersikap otoriter dan totaliter, dan lain sebagainya. Dalam konteks Indonesia yang masih berada dalam periode Demokrasi Liberal, institusi sosial terlihat dalam partai-partai politik dan lembaga legislatif yang berfungsi sebagai wadah aspirasi rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan demi mencapai kehidupan yang lebih baik.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penerapan sistem multipartai dalam periode Demokrasi Liberal menciptakan ketidakstabilan politik akibat perbedaan pandangan antar partai di parlemen. Perbedaan tersebut berakibat pada perubahan kabinet yang terjadi hampir tujuh kali selama periode Demokrasi Liberal, yang berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional. Menanggapi situasi ini, Soekarno berinisiatif untuk membatasi peran parlemen dengan beralih ke sistem Demokrasi Terpimpin. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Soekarno

²⁰ *Ibid.*

²¹ Karl Popper, *loc. cit.*, hlm. 156-157.

membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Dekrit ini menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan beralihnya ke Demokrasi Terpimpin.

Gagasan Soekarno mengenai Demokrasi Terpimpin sebenarnya telah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Dalam sistem ini, Soekarno tidak menginginkan adanya kebijakan multipartai, karena menurutnya, kebijakan tersebut akan menyebabkan ketidakstabilan di kabinet dan parlemen. Namun, keinginan Soekarno untuk menghapus sistem multipartai tidak didukung oleh M. Natsir, yang saat itu menjabat sebagai ketua partai Masyumi. Menurut Natsir, jika partai-partai dihilangkan, maka secara otomatis demokrasi pun akan lenyap karena tidak ada pihak oposisi yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Ketakutan Natsir adalah munculnya pemerintahan yang diktator.²² Oleh karena itu, ia menolak keras pendapat Soekarno yang ingin menghapuskan partai-partai.

Meskipun demikian, keresahan Soekarno mencapai puncaknya pada 5 Juli 1959, di mana ia menggantikan UUDS 1950 dengan UUD 1945. Pergantian ini tertuang dalam Dekrit Presiden yang berisi tentang pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945, penghapusan UUDS 1950, dan pembentukan MPRS serta DPAS. Akibat langsung dari keputusan ini adalah dibubarkannya DPR dan MPR hasil Pemilu 1955, yang kemudian digantikan oleh MPRS dan DPR Gotong Royong, di mana anggotanya diangkat langsung oleh Presiden. Selain pembubaran DPR dan MPR, Soekarno juga mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan partai-partai politik yang ada di Indonesia. Menurutnya, banyaknya partai politik hanya akan menambah jumlah pihak oposisi pemerintah, yang kemudian berpengaruh terhadap program pembangunan nasional. Dalam pidatonya pada 21 Februari 1957 yang berjudul “Menyelamatkan Republik Proklamasi,” Soekarno secara tegas menolak pihak oposisi. Baginya, oposisi merupakan konsep Barat yang hanya berfungsi untuk melawan pemerintah secara berlebihan.²³

²² Himawan Indrajat, *op. cit.*, hlm. 58.

²³ *Ibid*, hlm. 57.

Karena pandangannya yang negatif tentang oposisi, ia kemudian membuat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Parpol dan apabila ada Parpol yang tidak memenuhi syarat itu secara otomatis dibubarkan karena tidak memenuhi tuntutan pemerintah. Melalui kebijakan tersebut, Parpol yang awalnya berjumlah 30 turun menjadi 10 Parpol yang diakui pemerintah. Partai-partai itu antara lain PNI, PKI, NU, IPKI, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Arudji, dan Partai Islam Perti.²⁴ Kemudian untuk menyatukan kekuatan politik di Indonesia demi mencapai kerja sama yang efektif dibentuklah sebuah wadah khusus yang disebut Front Nasional.²⁵ Wadah ini didirikan berdasarkan ideologi Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme).

Selain kebijakan politik yang telah disebutkan, Soekarno berupaya menetapkan arah kebijakan negara guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur melalui manifesto politik (Manipol). Manipol kemudian diakui sebagai ideologi negara yang diperkaya dengan elemen USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Ideologi ini dirumuskan untuk mendukung rencana revolusi nasional yang diusung Soekarno demi mengembalikan stabilitas nasional.²⁶ Namun demikian, kebijakan pembentukan Manipol-USDEK justru mempersempit ruang gerak institusi-institusi lain dalam pemerintahan. Semua kebijakan yang diterapkan harus berlandaskan pada keputusan Presiden, dengan bantuan pihak-pihak yang ditunjuknya dalam institusi pemerintah lainnya.

Selama masa Demokrasi Terpimpin, kekuasaan terpusat pada Presiden. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Presiden membubarkan DPR dan MPR karena dianggap menentang kebijakan presiden, lalu menggantinya dengan MPRS dan DPA (Dewan Pertimbangan Agung). Anggota MPRS ditunjuk langsung oleh presiden, yang juga menjabat sebagai ketua DPA. Selain itu, ia memegang jabatan

²⁴ *Ibid*, hlm. 59.

²⁵ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1959 Tentang Front Nasional" dalam *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, <https://bphn.go.id>, diakses pada 19 Februari 2026.

²⁶ Edi Subkhan, "Ideologi, Kekuasaan, dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965)", *Journal of Indonesia History*, Vol. 7, No. 1 (Semarang: Agustus 2018), hlm. 26.

ketua dalam kabinet yang dinamakan Kabinet Kerja. Kabinet ini terdiri dari para menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden, dan dari sekian banyak menteri yang diangkat, tidak ada satupun pemimpin partai.²⁷ Hal ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah yang menolak sistem multipartai.

Walaupun tujuan Soekarno adalah mengembalikan stabilitas nasional demi mencapai masyarakat yang adil dan makmur melalui revolusi, cara yang ditempuhnya justru membatasi hak-hak warga negara. Dari perspektif dampak negatifnya, sistem ini telah memusatkan kekuasaan pada presiden, melemahkan parlemen, mengendalikan partai politik, dan membatasi kebebasan pers. Dalam kerangka pemikiran Popper, sistem ini justru mencerminkan karakter masyarakat tertutup, yang menunjukkan penolakan terhadap prinsip fallibilisme. Prinsip ini menegaskan bahwa semua pengetahuan manusia pada dasarnya bisa salah.²⁸ Dengan memusatkan kekuasaan pada presiden, muncul kecenderungan bagi penguasa untuk tidak mengakui otonomi individu, menolak kritik yang justru diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan warga negara, dan menganggap diri mereka sebagai pemegang kebenaran tunggal. Selain itu, kebijakan menyederhanakan partai politik untuk meminimalisasi oposisi justru dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap kritik. Popper menilai penguasa yang bersikap demikian menganggap kritik sebagai ancaman yang harus diberantas.

Lebih jauh, ketika institusi-institusi yang berfungsi sebagai wadah penampung aspirasi rakyat dibubarkan dan digantikan dengan institusi lain yang ditentukan oleh penguasa, hal ini berdampak pada praktik politik yang bersifat totalitarian, di mana penguasa memiliki kontrol tunggal terhadap warga negara dan semua elemen di dalamnya. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat dilihat melalui kebijakan presiden yang membubarkan DPR dan MPR, menggantinya dengan DPR-GR, MPRS, dan DPA yang anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden. Dalam situasi ini, tidak ada lagi institusi yang berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga penguasa dapat bertindak sewenang-wenang demi mencapai tujuan negara yang diidamkan. Melalui ideologi Nasakom,

²⁷ Arin Kusumaningrum, *op. cit.*, hlm. 40.

²⁸ Hilda Abelia Waluyo Putri dan Anggun Budu Kusuma, *loc. cit.*

terdapat kemungkinan pemerintah terjerumus ke dalam paham fasisme dan komunisme, di mana demi mencapai masa depan yang adil dan makmur, pemerintah menuntut kepatuhan total dari individu. Dalam konteks ini, kebebasan individu dapat dikorbankan demi kepentingan kolektif dan masa depan yang sejahtera. Inilah yang oleh Popper disebut utopia atau utopianisme, di mana orang menerima penderitaan saat ini demi masa depan yang lebih baik.²⁹

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, setelah Soekarno menyederhanakan sistem partai dan membentuk Front Nasional sebagai wadah untuk menyatukan kekuatan politik negara, termasuk partai politik dan militer yang berlandaskan ideologi Nasakom, partai-partai politik berlomba-lomba mencari dukungan demi eksistensinya. PKI, yang pada waktu itu tergolong sebagai partai besar, berhasil memperluas pengaruhnya dan melemahkan kedudukan partai lain. PKI menjadi salah satu partai yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan. Namun, persoalan baru muncul di kalangan pemerintahan, di mana terjadi persaingan ketat antara Presiden Soekarno, militer (Angkatan Darat), dan PKI. PKI dan militer memiliki tujuan politik yang berbeda; oleh karena itu, Soekarno berperan sebagai penengah untuk menjaga agar konsep Demokrasi Terpimpin dan Nasakom tetap berjalan. Namun, usaha Soekarno mengalami kegagalan karena PKI, melalui Gestapu, berupaya menyingkirkan Angkatan Darat dari panggung politik Indonesia, dan justru menghadapi serangan balik dari kubu militer. Kondisi ini berujung pada kegagalan Demokrasi Terpimpin dan penggulingan Soekarno dari jabatannya.³⁰

Sebelum Soekarno disingkirkan dari jabatannya sebagai presiden, terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah anggota TNI AD yang kemudian dikenal sebagai peristiwa G30S/PKI. Peristiwa ini dianggap sebagai upaya pengambilalihan kekuasaan negara yang melibatkan PKI. Namun, kejelasan mengenai peristiwa tersebut masih menjadi tanda tanya besar hingga saat ini. Dapat dikatakan bahwa periode Demokrasi Terpimpin berakhir setelah pecahnya peristiwa ini dan beralih menuju Masa Orde Baru. Lahirnya masa Orde Baru

²⁹ Karl Popper, *op. cit.*, hlm. 197.

³⁰ Himawan Indrajat, *loc. cit.*

ditandai dengan peristiwa G30S/PKI, pelengseran Soekarno dari jabatannya sebagai presiden pada 22 Februari 1967, dan pengangkatan Soeharto sebagai Presiden pada 12 Maret.³¹ Periode tersebut berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.³²

Soeharto, dalam kepemimpinannya sebagai presiden, berambisi mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis, serasi, dan seimbang berdasarkan ideologi Pancasila. Upaya mewujudkan tatanan ini dilakukan melalui program pembangunan nasional yang merata. Agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar, syarat utama yang harus dipenuhi adalah menstabilkan politik nasional yang sempat terganggu pada masa pemerintahan Soekarno (Orde Lama). Untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis, seimbang, dan serasi, Soeharto mengadopsi model kepemimpinan Jawa yang dikenal sebagai kejawan. Menurut Mudler (dalam Retnowati, 2018), kejawen merupakan sistem pemikiran yang berisi kosmologi dan seperangkat konsepsi yang pada hakikatnya bersifat mistik dan membentuk antropologi Jawa sendiri.³³ Dalam konsep kejawen, kekuasaan harus terpusat pada satu figur pemimpin atau raja. Figur ini diposisikan sebagai pihak yang tidak boleh dibantah demi menjaga harmoni dan ketertiban. Ia adalah sosok yang harus dihormati dan ditaati, di mana perintahnya harus dilaksanakan dengan baik tanpa perlu dipertanyakan.³⁴ Dalam pandangan ini, stabilitas dianggap lebih penting dibandingkan dengan kebebasan, sehingga kritik dan perbedaan pendapat dipandang sebagai ancaman terhadap pemimpin atau raja. Dalam konteks Soeharto, pemimpin dipersepsikan sebagai figur bapak bagi rakyatnya, sehingga tidak boleh dibantah atau dikritik. Apabila dua hal ini dilakukan, maka sikap tersebut akan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara dan harus ditumpas.

Secara ideologis, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi politik dan masyarakat, dengan sikap anti-komunis sebagai

³¹ Chistopher Ezra Manurung, dkk., *loc. cit.*

³² Husni Abdullah Mubarak, *Bangkitnya Orde Baru* (Yogyakarta: Penerbit Elementa Media, 2021), hlm. 4.

³³ Endang Retnowati, *Tatanan Orde Baru: Distorsi Ideologi Pancasila* (Jakarta: Penerbit LIPI Press, 2018), hlm. 5-6.

³⁴ Wijaya, *Ajaran Luhur Kejawen* (Yogyakarta: Penerbit Bangun Bangsa, 2019), hlm. 151-152.

fondasi utama setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI. Pancasila dijadikan alat legitimasi politik untuk mempertahankan stabilitas negara dan kontrol sosial. Pada periode ini, Pancasila mengalami pergeseran makna dari simbol persatuan menjadi alat untuk membenarkan tindakan represif terhadap oposisi dan kritik terhadap pemerintah.³⁵ Siapa pun yang mengkritik pemerintah berarti mengkritik Pancasila. Sementara itu, fondasi anti-komunisme digunakan untuk memberantas sisa-sisa komunisme yang ada sejak periode Orde Lama.

Selain itu, untuk menopang kekuasaan, Soeharto memberikan peran signifikan kepada militer dalam pemerintahan melalui konsep Dwifungsi ABRI. Melalui Dwifungsi, tugas tentara tidak terbatas pada menjaga keamanan negara, tetapi juga terlibat langsung dalam politik dan pemerintahan, sehingga pada periode ini perwira militer juga mengisi jabatan-jabatan sipil.³⁶ Kebijakan lainnya adalah penyederhanaan sistem politik melalui penggabungan partai politik. Partai-partai politik yang ada sejak periode Demokrasi Terpimpin dilebur ke dalam tiga kelompok besar, yaitu Golkar (sebagai partai pendukung pemerintah), PPP (sebagai partai Islam hasil fusi), dan PDI (sebagai partai nasionalis yang merupakan fusi dari PNI, IKPI, Parkindo, Partai Katolik, dan Murba).³⁷ Sebagai partai pendukung pemerintah, Golkar selalu memenangkan Pemilu, menjadikan Pemilu hanya sebagai legitimasi formal daripada sarana demokrasi yang sesungguhnya.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru melaksanakan pembangunan terencana melalui program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dan Trilogi Pembangunan yang menekankan stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan.³⁸ Kebijakan ini memang menghasilkan berbagai kemajuan, seperti pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, penurunan inflasi, peningkatan produksi pangan hingga swasembada beras, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang mengantarkan Indonesia ke dalam kategori negara berkembang. Meskipun demikian, di balik keberhasilan

³⁵ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, dkk., *op. cit.*, hlm. 41.

³⁶ Tazkia Kamila Sofuan, "Mengulik Sejarah Penerapan Dwifungsi ABRI Pada Masa Orde Baru", *Jurnal Kalpataru*, Vol. 9, No. 2 (Palembang: Desember 2023), hlm. 166.

³⁷ Arief Hidayat, *loc. cit.*

³⁸ Rizki Rahmawati, "Pelita: Sejarah Pembangunan Nasional di Era Orde Baru", *Jurnal Etnohistori*, Vol. 9, No. 2 (Maluku Utara: November 2022), hlm. 38.

tersebut, negara menerapkan kontrol sosial yang ketat melalui indoktrinasi Pancasila yang dikenal dengan istilah P4 (Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila), pembatasan kebebasan pers, dan pengawasan terhadap aktivitas politik dan masyarakat.

Melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, secara tidak langsung Orde Baru telah menunjukkan praktik-praktik otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Praktik-praktik ini terjadi karena adanya kekuasaan yang terpusat pada presiden dan segelintir elite, serta banyak sektor ekonomi yang dikuasai oleh keluarga dan kroni Soeharto. Akibat kekuasaan yang terlalu lama dengan berbagai kebijakan yang menyimpang dan krisis moneter Asia pada tahun 1997 yang berdampak pada kehancuran ekonomi nasional, memicu mahasiswa dan rakyat untuk melakukan aksi protes secara besar-besaran. Melalui aksi tersebut, pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, menandakan akhir dari masa Orde Baru.³⁹ Periode ini memang berkontribusi pada terciptanya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi yang cukup baik, namun di balik kesuksesan tersebut, rezim ini justru mematikan demokrasi, kebebasan politik, dan menguatkan praktik kekuasaan yang represif dan koruptif.

Melalui uraian mengenai situasi masa Orde Baru di atas, dapat disimpulkan bahwa periode ini mencerminkan ciri masyarakat tertutup yang lebih sistematis dan stabil. Pemerintah mendambakan pembangunan negara di atas dasar stabilitas, ketertiban, dan harmoni, namun cara yang ditempuh justru menekan kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi. Selama periode ini, kekuasaan tidak dapat dikoreksi secara efektif. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis. Pemilu hanya berfungsi sebagai legitimasi formal untuk memenuhi tuntutan aturan, sementara mekanisme pelaksanaannya disiasati secara curang. Di sini, mekanisme pergantian kekuasaan tidak berjalan secara rasional dan terbuka. Selain itu, presiden menganggap kritik sebagai ancaman bagi stabilitas nasional dan menentang Pancasila. Oleh karena itu, oposisi dilemahkan, media dibungkam, dan

³⁹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, dkk., *op. cit.*, hlm. 41-42.

aktivis ditangkap. Sikap ini bertentangan dengan visi masyarakat terbuka di mana kritik sesungguhnya menjadi sarana untuk menciptakan kemajuan negara yang rasional.

Lebih jauh, periode ini justru memonopoli kebenaran. Melalui ideologi Pancasila, penetapan P4, dan kurikulum resmi, negara memiliki hak penuh untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah secara ideologis. Masyarakat diperlakukan sebagai objek yang tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penentuan arah kebijakan, tetapi dipaksa untuk mendukung kebijakan demi pembangunan nasional. Situasi ini dapat dikategorikan sebagai tatanan yang bersifat kolektivistik, di mana kebebasan individu harus dikorbankan demi kepentingan kolektif.⁴⁰

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem politik Indonesia pascakemerdekaan menunjukkan dinamika politik yang beralih dari masyarakat terbuka menuju masyarakat tertutup. Pada periode awal kemerdekaan (periode revolusi 1945-1949), meskipun kondisi politik nasional belum stabil akibat sisa-sisa kolonialisme yang berupaya menguasai kembali bangsa ini, fondasi masyarakat terbuka telah mulai terbentuk, di mana pemerintah memandang masyarakat sebagai subjek otonom yang berhak menentukan nasibnya sendiri.⁴¹ Namun, pembentukan fondasi masyarakat terbuka belum berjalan maksimal karena Indonesia masih terjebak dalam situasi perang demi menjaga kesatuan NKRI. Perkembangan masyarakat terbuka mulai lebih jelas ketika sistem pemerintahan beralih menuju Demokrasi Liberal. Pada periode ini, sistem parlementer diberlakukan, memberikan ruang bagi pelaksanaan sistem multipartai, adanya konstitusi yang membatasi penguasa, serta dilaksanakannya pemilihan umum pertama kali (1955) yang memungkinkan rakyat menjalankan fungsi kontrolnya terhadap kekuasaan melalui institusi politik.

Namun, kecenderungan tersebut berbalik arah secara drastis setelah diberlakukannya sistem Demokrasi Terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan

⁴⁰ William Gorton, "Karl Popper: Political Philosophy", dalam *Internet Encyclopedia of Philosophy*, <https://iep.utm.edu/popp-pol/>, diakses pada 19 Februari 2026.

⁴¹ Nunuk Nuswardani, *loc. cit.*

terpusat pada presiden, oposisi dilemahkan, partai politik disederhanakan, dan institusi pengawasan dibubarkan lalu diganti dengan institusi lain yang anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden. Dalam kerangka pemikiran Popper, situasi ini mencerminkan praktik kehidupan masyarakat tertutup, di mana kebenaran dimonopoli, kritik dianggap sebagai ancaman, dan individu kehilangan otonomi politiknya. Pola ini semakin menguat ketika terjadi peralihan sistem menuju Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada periode ini, Soeharto menginginkan negara yang dibangun di atas fondasi stabilitas, harmoni, dan pembangunan ekonomi yang signifikan, namun cara yang diambil justru membatasi kebebasan individu, membungkam oposisi, memonopoli kebenaran melalui ideologi Pancasila, dan mengukuhkan peran militer dalam politik demi menopang stabilitas kekuasaan. Dalam kerangka pemikiran Popper, kekuasaan yang tidak dapat dikoreksi secara rasional, pemilu yang hanya bersifat legitimasi formal, dan dominasi negara atas ruang publik menjadikan Orde Baru sebagai sistem masyarakat tertutup yang lebih stabil.

4.3 Runtuhnya Partai Nasional Indonesia sebagai Konsekuensi Struktural dari Masyarakat Tertutup Menurut Karl Popper

Jika kita menelaah semua uraian mengenai penyebab kemunduran PNI dalam kerangka pemikiran Karl Popper, dapat ditemukan benang merah bahwa keruntuhan itu bukan semata-mata disebabkan oleh persoalan internal partai, melainkan merupakan konsekuensi struktural dari perubahan sistem politik Indonesia yang semakin bergerak menuju masyarakat tertutup sejak Era Demokrasi Terpimpin hingga Orde Baru. Konsep masyarakat tertutup yang digagas Popper merujuk pada tatanan sosial yang bersifat dogmatis, menolak kritik, bersikap otoriter, melakukan kontrol total terhadap warga negara, mengutamakan kepentingan kolektif daripada individu, dan memutlakkan kebenaran penguasa.⁴² Dalam konteks Indonesia selama periode Demokrasi Terpimpin hingga Orde Baru, karakter-karakter ini justru ditampilkan oleh penguasa, yang membuat partai politik kehilangan fungsi representatifnya. Pemerintah Indonesia pada saat itu memandang

⁴² Azril Azifambayunasti, *op. cit.*, hlm. 41.

partai politik bukan sebagai subjek demokrasi, melainkan sebagai alat pemerintah untuk menopang kekuasaan, sehingga keberadaannya sepenuhnya tergantung pada kehendak penguasa.

PNI selama periode Demokrasi Liberal (1950-1959) berada dalam situasi masyarakat yang relatif terbuka, di mana terdapat pemberlakuan sistem multipartai, pelaksanaan pemilu sebagai tonggak sejarah demokrasi di Indonesia, adanya parlemen yang kuat, serta jaminan keamanan bagi institusi-institusi politik untuk berfungsi sebagai pihak oposisi. Situasi ini memungkinkan PNI menjalankan fungsi representatifnya sebagai wadah rasional yang menampung aspirasi rakyat. Meskipun demikian, situasi ini berubah drastis setelah diberlakukannya sistem Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam sistem ini, kekuasaan terpusat pada presiden, lembaga-lembaga perwakilan rakyat dibubarkan dan diganti dengan institusi lain yang anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden, partai politik disederhanakan dan peran mereka dibatasi, serta tidak ada lagi pihak oposisi yang secara tegas mempersoalkan kebijakan pemerintah.⁴³ Lebih jauh, semua elemen dalam negara, baik pemerintah, institusi sosial, maupun masyarakat, harus tunduk pada penguasa. Seluruh aktivitas masyarakat harus didasarkan pada perintah penguasa. Jika dilihat dalam kerangka pemikiran Popper, inilah momen transisi dari masyarakat terbuka menuju masyarakat tertutup. Situasi tersebut sejalan dengan kritik Popper terhadap gagasan Plato mengenai negara yang dikendalikan secara ketat oleh pemimpin. Karakter masyarakat tertutup pada masa Plato tampak dari sikap negara yang menempatkan individu di bawah otoritas pemimpin dan mengatur aktivitasnya.⁴⁴ Di sini, Plato secara tidak langsung telah menghilangkan ruang kritik dan oposisi yang berfungsi untuk mengoreksi kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, tindakan serupa telah dilakukan oleh presiden selama periode Demokrasi Terpimpin, di mana legitimasi kekuasaan tidak lagi diuji melalui kritik dan perdebatan publik, tetapi diperkuat melalui doktrin ideologis

⁴³ Sapti Eka Pratiwi, "Pembubaran Partai Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin", *Jurnal Avatara*, Vol. 4, No. 3 (Surabaya: Oktober 2016), hlm. 1062-1063.

⁴⁴ Karl Popper, *op. cit.*, hlm. 9.

seperti Manipol-USDEK dan Nasakom yang menjadi dasar pembenaran kebijakan negara.

Setelah institusi politik seperti DPR dan MPR diganti dengan DPR-GR, MPRS, dan DPA yang anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden, partai-partai politik, termasuk PNI, mulai kehilangan pengaruhnya dalam panggung politik Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan pembentukan Front Nasional yang membuat perwakilan partai tidak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan ditunjuk langsung oleh penguasa. Akibatnya, partai kehilangan kedaulatan institusionalnya sebagai representasi rakyat. Jika ditelisik melalui kacamata Popper, PNI tidak lagi berfungsi sebagai institusi politik rasional untuk mengoreksi kekuasaan, tetapi direduksi menjadi bagian dari sistem kolektivisme yang harus tunduk pada kebenaran tunggal penguasa. Partai tidak lagi memiliki kebebasan untuk menyalurkan aspirasi rakyat, tetapi dipaksa oleh sistem hierarkis untuk mengedepankan kepentingan kolektif yang lebih besar demi menjaga stabilitas.⁴⁵ Meskipun dihadapkan dengan sikap otoritatif penguasa, PNI tetap berjuang untuk menjadi pihak oposisi pemerintah. Sikap ini tampak dalam pernyataan Iskaq Tjokroadisurjo yang menegaskan bahwa berapapun jumlah wakil PNI yang ada di DPR-GR, mereka sama sekali bukan menjadi representasi atau wakil partai, sebab keanggotaan mereka tidak dipilih secara demokratis, melainkan diangkat langsung oleh presiden.⁴⁶ Sikap ini kemudian menciptakan konflik yang cukup serius antara PNI dan penguasa, yang berujung pada melemahnya eksistensi partai.

Situasi keterpurukan PNI semakin diperparah ketika terjadi peralihan dari Demokrasi Terpimpin menuju Orde Baru. Di bawah rezim Soeharto, situasi negara dan pemerintah secara tegas menunjukkan karakter-karakter kehidupan masyarakat yang lebih tertutup. Konsep masyarakat tertutup diperkuat melalui kebijakan penetapan Pancasila sebagai ideologi negara, adanya Dwifungsi ABRI, diberlakukannya Pancasila sebagai asas tunggal, dan penyederhanaan partai politik. Pada dasarnya, penetapan Pancasila sebagai ideologi negara tidak menjadi persoalan, namun menjadi masalah ketika Pancasila mengalami pergeseran makna,

⁴⁵ Azril Azifambayunasti, *loc. cit.*

⁴⁶ Arin Kusumaningrum, *op. cit.*, hlm. 13.

yang awalnya menjadi pedoman hidup bernegara, dialihfungsikan menjadi alat legitimasi penguasa.⁴⁷ Dalam kondisi ini, PNI tidak lagi diperlakukan sebagai subjek otonom, melainkan dipaksa untuk bergabung dengan partai-partai lain menjadi satu partai baru yang justru menghilangkan kekhasan PNI. Partai-partai yang sudah dibatasi aktivitasnya sejak periode Demokrasi Terpimpin mulai kehilangan eksistensinya ketika memasuki masa Orde Baru. Dalam kerangka pemikiran Popper, kebijakan fusi partai menunjukkan bentuk tribalisme politik modern, di mana identitas politik dilebur ke dalam identitas kolektif yang dikendalikan negara, sehingga sifat pluralistik negara hilang dan diganti dengan ideologi irasional yang menuntut kesamaan dari setiap warga negara. Selain itu, situasi ini menunjukkan bahwa penguasa telah mengabaikan keputusan individu yang merupakan salah satu karakter khas masyarakat terbuka.⁴⁸ Dalam situasi yang semakin terpuruk ini, PNI tidak hanya mengalami kehilangan struktur organisasinya, tetapi juga makna historis dan ideologisnya sebagai partai nasionalis yang hadir untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa runtuhnya PNI mencerminkan ciri utama masyarakat tertutup yang menolak prinsip fallibilism. Penguasa tidak mengakui bahwa dirinya dapat salah dan terperangkap dalam kekeliruan, sehingga kritik dipandang sebagai ancaman.⁴⁹ Anggapan ini yang membuat pemimpin negara sejak masa Demokrasi Terpimpin hingga Orde Baru mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan dan meleburkan partai politik. Partai politik dan beberapa institusi lainnya yang memiliki fungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoreksi kerja pemerintah justru dilemahkan demi melanggengkan kekuasaan pemimpin negara. Fungsi oposisi partai dibekukan dan menuntut partai untuk taat pada aturan yang ditetapkan penguasa. Partai-partai politik, termasuk PNI, tidak lagi dipandang sebagai wadah penampung aspirasi rakyat, melainkan sebagai sumber persoalan yang dapat mengancam stabilitas nasional dan eksistensi penguasa. Dengan demikian, runtuhnya PNI bukan karena ketidakmampuannya menjalankan fungsi sebagai lembaga representatif

⁴⁷ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, dkk., *loc. cit.*

⁴⁸ Azril Azifambayunasti, *op. cit.*, hlm.40.

⁴⁹ Hilda Abelia Waluyo Putri dan Anggun Budu Kusuma, *loc. cit.*

masyarakat, tetapi karena sistem politik pemerintahan yang tidak lagi membutuhkan rakyat untuk terlibat dalam panggung politik nasional.

Pengalaman runtuhnya PNI menjadi contoh konkret bagaimana sistem masyarakat tertutup secara struktural menghancurkan institusi-institusi politik yang demokratis. Apabila kebenaran dimonopoli penguasa, kritik dianggap ancaman, dan kekuasaan tidak dapat dikoreksi secara rasional, maka partai politik secara otomatis kehilangan fungsi epistemologis dan politiknya. Kehancuran PNI bukan disebabkan oleh kehilangan massa pendukungnya atau kalah dalam kompetisi demokratis, melainkan karena demokrasi yang menjadi identitas bangsa ini justru dimatikan oleh struktur masyarakat yang tertutup. Dengan demikian, kehancuran PNI bukanlah peristiwa kebetulan dalam sejarah politik nasional, melainkan sebuah konsekuensi logis dari sistem kekuasaan yang menolak masyarakat terbuka dan menggantikannya dengan tatanan masyarakat yang bersifat kolektivistik, otoriter, dan anti-kritik sebagaimana diuraikan oleh Karl Popper.

4.4 Runtuhnya PNI dan Penguatan Demokrasi: Pembelajaran untuk Masyarakat Terbuka Indonesia

Pengalaman runtuhnya Partai Nasional Indonesia merupakan pelajaran berharga bagi keberlangsungan demokrasi di era reformasi Indonesia. Pertama, dapat dipetik pelajaran bahwa demokrasi dapat bertahan dan berkembang secara rasional bukan semata-mata karena adanya institusi politik resmi, seperti partai politik, lembaga legislatif, dan pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi akan berfungsi dengan baik jika didukung oleh komitmen seluruh warga negara, termasuk pemerintah dan institusi politik lainnya, untuk menghidupkan budaya dan karakter masyarakat terbuka. Budaya atau karakter yang dimaksud meliputi sikap menjunjung tinggi rasionalitas kritis, kebebasan berpikir, pengakuan bahwa tidak ada kebenaran absolut, penolakan terhadap kolektivisme dan utopianisme, serta penguasa yang tidak bersikap otoriter atau totaliter, sambil menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Apabila budaya atau karakter ini tidak menjadi komitmen bersama, maka demokrasi akan rentan dimanipulasi oleh kekuasaan. Selain itu, penguasa dapat menafsirkan hal-hal dari sudut pandang sendiri dan

memaksakan opininya untuk diterima masyarakat tanpa adanya pertanyaan. Contoh nyata dari sikap ini terlihat dalam kepemimpinan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin dan Soeharto pada masa Orde Baru. Menurut Marwono, dalam karyanya yang berjudul "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", Soekarno dan Soeharto keliru dalam menafsirkan aturan hukum yang termuat dalam Pasal 7 UUD Tahun 1945 mengenai masa jabatan presiden. Pasal ini menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Frasa "dan sesudahnya dapat dipilih kembali" ditafsirkan bahwa presiden dan wakil presiden dapat terpilih secara terus-menerus. Tafsiran ini didukung oleh para kroni yang duduk di kursi DPR dan MPR, sehingga Soekarno dapat menjabat selama 25 tahun dan Soeharto selama 32 tahun.⁵⁰ Inilah sikap manipulatif yang dapat muncul apabila tidak ada komitmen seluruh warga negara untuk menegakkan prinsip-prinsip masyarakat terbuka.

Kedua, pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya otonomi partai dari negara. Salah satu faktor yang berkontribusi pada runtuhnya PNI adalah kebijakan fusi partai. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan partai politik melalui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai, karena menurutnya, jumlah partai yang terlalu banyak justru mengakibatkan ketidakstabilan nasional yang berdampak pada mandegnya pembangunan nasional.⁵¹ Akibat langsung dari kebijakan ini adalah berkurangnya jumlah partai politik yang awalnya lebih dari tiga puluh menjadi sepuluh partai yang tersisa. Situasi ini semakin buruk ketika Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Soeharto menerapkan kebijakan fusi partai, di mana sepuluh partai yang tersisa sejak periode Demokrasi Terpimpin dipaksa untuk bergabung menjadi hanya tiga partai.⁵² Akibat langsung dari kebijakan ini adalah berkurangnya pihak oposisi yang berfungsi untuk mengoreksi dan mengkritik kekuasaan apabila terjadi penyimpangan. Melalui dua kebijakan dalam dua periode tersebut, terlihat bahwa intervensi pemerintah terhadap partai telah melampaui batas. Akibat intervensi tersebut, partai kehilangan otonominya dan dipaksa untuk

⁵⁰ Marwono, *op. cit.*, hlm. 166-167.

⁵¹ Himawan Indrajat, *loc. cit.*

⁵² Arief Hidayat, *loc. cit.*

tunduk pada kebijakan penguasa. Partai tidak lagi berfungsi sebagai representasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, melainkan dijadikan alat legitimasi penguasa. Pengalaman tersebut mengajarkan bahwa negara perlu mengakui otonomi partai dan memberikan kebebasan kepada partai untuk menjalankan tugas sesuai dengan fungsi pembentukannya. Pemerintah dapat melakukan intervensi sejauh persoalan tersebut mengancam eksistensi negara dan kedaulatan rakyat.

Ketiga, pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya mekanisme internal partai yang demokratis dan rasional. Perlu diakui bahwa runtuhnya PNI juga dipengaruhi oleh faktor internal partai. Konflik antar anggota partai dan dominasi elitisme membuat partai mudah terjerumus ke dalam fragmentasi internal, krisis legitimasi, dan praktik oligarki yang menolak aspirasi rakyat. Ketika konflik tidak dikelola secara demokratis, maka bahaya perpecahan partai ke dalam faksi-faksi dapat terjadi. Faksi-faksi tidak lagi bekerja demi kepentingan publik, tetapi memfokuskan perhatian hanya pada sekelompok kecil orang. Persoalan ini pernah terjadi dalam kubu PNI selama periode Demokrasi Liberal. Saat itu, PNI terpecah menjadi tiga faksi besar, yakni faksi Sidik, faksi Wilopo, dan faksi PNI-Partindo. Perpecahan tersebut terjadi karena adanya perbedaan tujuan politik yang tidak dikelola dengan baik, sehingga ketiganya saling mempertahankan tujuan politik masing-masing.⁵³ Perpecahan ini turut berkontribusi pada lemahnya PNI. Sementara itu, dominasi elit politik dalam partai dapat mengikis partisipasi kader partai yang berdampak pada hilangnya ruang regenerasi kepemimpinan. Kader partai merasa tidak diperhitungkan karena semua kebijakan partai ditentukan oleh segelintir elit, sementara pendapat anggota lainnya diabaikan. Situasi ini juga berkontribusi bagi runtuhnya PNI. Ketika persoalan internal partai tidak dapat diselesaikan secara demokratis, maka kapasitas partai untuk melawan dominasi kekuasaan akan melemah. Dengan demikian, penguatan demokrasi Indonesia tidak hanya bergantung pada reformasi institusional di tingkat negara, tetapi juga pada upaya mendemokratisasi internal partai itu sendiri.

⁵³ Jose Eliseo Rocamora, *op. cit.*, hlm. 61.

Berdasarkan keseluruhan pengalaman keruntuhan PNI, dapat dipahami bahwa demokrasi dapat runtuh bukan hanya karena represi negara, tetapi juga karena lemahnya kesadaran kolektif akan pentingnya menghidupi budaya dan karakter masyarakat terbuka. Jika dilihat dari perspektif pemikiran Popper, penguatan demokrasi Indonesia harus didasarkan pada terciptanya situasi masyarakat yang terbuka terhadap kritik, menjunjung tinggi pluralisme, menolak segala bentuk absolutisme, mengedepankan kebebasan individu, serta menolak paham kolektivisme, dan bebas dari praktik totalitarianisme dan otoritarianisme. Tanpa karakter-karakter ini, demokrasi akan selalu berada dalam risiko untuk terjebak kembali dalam logika masyarakat tertutup.